

BAB 5

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena thrifting di Purwokerto, dengan fokus pada konstruksi sosial dan relasi kuasa dalam praktik konsumsi pakaian bekas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thrifting telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup populer di kalangan anak muda, yang tidak hanya dilihat sebagai alternatif konsumsi yang lebih ramah lingkungan tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan dan status sosial. Namun, meskipun praktisi thrifting di Purwokerto berupaya mengurangi konsumsi barang baru, praktik ini tetap berada dalam kerangka pasar kapitalis global yang mengendalikan preferensi konsumsi melalui merek bermerk dan media sosial.

Praktik thrifting, meskipun dipandang sebagai perlawanan terhadap fast fashion, tidak sepenuhnya memutuskan siklus konsumsi berlebihan, tetapi malah memperkuat konsumsi berlebihan melalui pencarian barang bermerk, yang tetap mengarah pada simbol status sosial yang dikendalikan oleh industri mode besar. Ini memperlihatkan adanya relasi kuasa ekonomi yang mengatur preferensi pasar, meskipun dalam konteks barang bekas. Oleh karena itu, meskipun thrifting menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan, fenomena ini tetap berada dalam sistem kapitalisme yang lebih besar yang mengarah pada ketimpangan ekologis antara negara maju dan negara berkembang.

Dalam konteks ekonomi sirkular, prinsip reduce, reuse, recycle sangat relevan untuk mengurangi limbah tekstil yang semakin meningkat akibat meningkatnya konsumsi pakaian bekas. Namun, penerapan prinsip ini di Purwokerto masih menghadapi tantangan besar terkait dengan pengelolaan limbah tekstil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan limbah tekstil, termasuk penguatan infrastruktur daur ulang di Purwokerto. Pemerintah lokal perlu memperkenalkan kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah tekstil dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk daur ulang pakaian bekas yang tidak terjual.

Selain itu, pendidikan masyarakat mengenai pentingnya daur ulang tekstil dan pemilihan barang berkualitas yang dapat digunakan lebih lama menjadi sangat penting. Kesadaran akan dampak ekologis dari peningkatan konsumsi pakaian bekas, yang sering kali terabaikan dalam narasi thrifting, perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberdayakan untuk tidak hanya melihat thrifting sebagai cara untuk mengakses barang bermerk dengan harga lebih murah, tetapi juga sebagai cara untuk mengurangi limbah tekstil dan berpartisipasi dalam ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan pengelolaan limbah tekstil di Purwokerto, seperti yang diatur dalam Perda Banyumas Nomor 9 Tahun 2020, harus diperbarui dan lebih mengarah pada pengaturan limbah tekstil secara spesifik, termasuk pemilahan limbah tekstil di sumber dan pengaturan tentang tanggung jawab produsen dan penjual pakaian—termasuk toko

thrifting—terhadap limbah yang mereka hasilkan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, Perda tersebut kurang efektif dalam mendorong terbentuknya ekonomi sirkular untuk sektor tekstil.

Dalam perspektif politik ekologi, meskipun thrifting sering dipandang sebagai alternatif ramah lingkungan, ia juga berperan dalam mengalihkan beban ekologis dari negara maju ke negara berkembang, yang memiliki kapasitas pengelolaan sampah terbatas. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara maju untuk bertanggung jawab terhadap limbah tekstil yang mereka hasilkan dan mengeksplorasi cara-cara yang lebih adil dan efektif untuk mengelola limbah tekstil mereka sendiri. Sementara itu, negara berkembang, seperti Indonesia, harus berfokus pada pengembangan kapasitas pengelolaan limbah tekstil untuk mengurangi ketergantungan pada negara maju dalam hal pengelolaan limbah ini.

Secara keseluruhan, meskipun thrifting dapat mengurangi konsumsi pakaian baru, ia tetap beroperasi dalam kerangka sistem yang lebih besar yang dikendalikan oleh kapitalisme global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi keberlanjutan dalam prinsip ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah tekstil yang lebih bertanggung jawab.

